

PENGARUH EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**Saring Suhendro**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

Saring.suhendro@feb.unila.ac.id**INFO ARTIKEL****Dikumpulkan:** 25 Maret 2024;**Diterima:** 24 Mei 2024;**Terbit:** 30 Juli 2024;

Volume 29, Nomor 2,

Juli 2024, pp. 148-155

<http://doi.org/10.23960/jak.v29i2.2574>**Corresponding author:**

Saring Suhendro

(Jalan Prof. Dr. JI. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141)

Email: saring.suhendro@feb.unila.ac.id**ABSTRACT**

The aim of this study is to provide direct evidence on how the reliability of local government financial reports is influenced by the effectiveness and efficiency of local government financial management, as well as the local government's internal control system. The secondary data used in this study consists of financial reports from 524 districts and cities across Indonesia for the year 2022. The results indicate that efficiency does not have a significant impact on the reliability of local government financial reports. However, the effectiveness of financial management, as measured by weaknesses in the internal control system, has a significant positive impact on the reliability of local government financial reports.

Keywords: *Effectiveness and efficiency of local financial management, internal control system, opinion, and reliability of financial reports.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana keandalan laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan serta sistem pengendalian internal. Data sekunder yang digunakan mencakup laporan keuangan dari 524 pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk tahun 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi tidak memiliki dampak signifikan terhadap keandalan laporan keuangan, sementara efektivitas pengelolaan keuangan, yang diukur melalui kelemahan sistem pengendalian internal, berpengaruh positif secara signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, opini dan keandalan laporan keuangan.*

A. PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah salah satu metode untuk memantau kinerja keuangan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan berikut sesuai dengan standar akuntansi pemerintah: laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Lamp II PP 71/2010). Opini yang diberikan pada laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan keandalannya. Semakin andal laporan keuangan tersebut, semakin baik pula opininya.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang andal. Pengelolaan ini harus dilakukan secara tertib, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat (PP 12 Tahun 2019). Sama halnya dengan pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal juga berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan daerah. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki dampak terhadap keandalan laporan keuangan daerah (Baining et al., 2021; Handayani et al., 2022; Indriyani & Ahmad, 2023; Kuntadi et al., 2022; Kusnadi et al., 2022; Latjandu et al., 2016; Maydiyanti et al., 2020; Pura, 2021; Raudhatul & Ishak, 2023; Shofiyah et al., 2023).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan pada 496 laporan keuangan pemerintah daerah (91%), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan pada 41 laporan keuangan pemerintah daerah (8%), dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) diberikan pada 5 laporan keuangan

pemerintah daerah (1%)..

Hasil pemeriksaan BPK tahun 2022 menunjukkan bahwa 15 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) naik dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sementara 18 LKPD turun dari WTP menjadi WDP. Bahkan, ada satu pemerintah daerah yang turun dari WTP menjadi Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Dibandingkan dengan tahun 2021, opini LKPD tahun 2022 menunjukkan penurunan pada tingkat provinsi dari 34 (100%) menjadi 32 (94%) LKPD, dan pada tingkat kota dari 89 (96%) menjadi 85 (91%) LKPD.

Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 43,46%, kelemahan dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebesar 37,17%, serta kelemahan dalam struktur pengendalian internal sebesar 19,37% (Ihtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2015). Meskipun pelaporan keuangan telah diterapkan sejak lama, masalah pertanggungjawaban dan kelemahan sistem pengendalian tetap menjadi isu utama.

Variabel efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam penelitian ini didasarkan pada studi Wahyuni (2008) Sebaliknya, variabel sistem pengendalian internal, yang diukur berdasarkan kelemahannya, mengacu pada studi Martani & Zaelani (2011). Namun, dalam penelitian ini, sistem pengendalian internal digunakan sebagai variabel independen. Sementara itu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah keandalan laporan keuangan, yang diukur menggunakan opini LKPD. Hal ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya (Baining et al., 2021; Handayani et al., 2022; Indriyani & Ahmad, 2023; Kuntadi et al., 2022; Kusnadi et al., 2022; Latjandu et al., 2016; Maydiyanti et al., 2020; Pura, 2021; Raudhatul & Ishak, 2023; Shofiyah et al., 2023).

Hasil pemeriksaan BPK-RI atas 542 LKPD pada tahun 2022 menunjukkan 7.661 temuan yang mencakup 12.855 masalah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari jumlah tersebut, terdapat 5.628 masalah kelemahan SPI dan 7.227 masalah ketidakpatuhan, masing-masing dengan nilai Rp3,07 triliun. Temuan ini terus dipublikasikan oleh BPK dan disarankan untuk diperbaiki di masa mendatang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh efektivitas pendapatan, efisiensi pengelolaan keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Kontribusi penelitian ini menekankan pentingnya perhatian terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta sistem pengendalian intern untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memperbaiki pengelolaan keuangan mereka dengan meningkatkan akuntabilitas keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan keagenan terjadi dalam pemerintahan antara individu yang bertindak sebagai agen dan pemerintah yang bertindak sebagai *principal* (Bergman & Lane, 1990; Gilardi, 2001; Lane, 2000; Moe, 1984; STRØM, 2000). Pemerintah dapat membuat kebijakan yang hanya menguntungkan penguasa dan pemerintah itu sendiri, dengan mengorbankan kesejahteraan dan kepentingan umum. Salah satu cara untuk memantau dan mengurangi biaya lembaga adalah melalui laporan keuangan. Pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah kontraktual seperti informasi asimetris, risiko moral, dan pilihan yang tidak adil.

Bergman & Lane (1990) menyatakan bahwa teori *principal-agent* dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan publik. Dalam konteks ini, kontrak antara *principal* dan agen untuk menyediakan layanan publik menjadi fokus utamanya. Semua aspek yang terkait dengan kontrak, seperti anggaran, menjadi perhatian utama. Dalam hal pembagian sumber daya publik, terdapat hubungan yang jelas dan nyata antara pemerintah dan para pemilih. Masalah yang mungkin muncul dalam hubungan keagenan meliputi asimetri informasi, rasionalitas terbatas, risiko moral, dan pilihan negatif, yang tingkatannya sebanding dengan yang ada di sektor publik (Berghman & Lane, 1990).

Dalam perspektif hubungan prinsipal-agen, informasi dikelola oleh prinsipal dan agen untuk Dalam konteks hubungan *principal-agent*, baik *principal* maupun agen mengelola informasi untuk memaksimalkan keuntungan atau kepentingan pribadi. Karena kedua pihak sering memiliki konflik kepentingan, jenis dan jumlah informasi yang dibutuhkan akan berbeda. Selain itu, perilaku moral hazard dan *adverse selection* muncul dalam hubungan antara *principal* dan agen. Moral hazard adalah kecenderungan agen untuk mengabaikan atau tidak sepenuhnya berusaha bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* Petrie (2002). Sebaliknya, *adverse selection* adalah ketidakmampuan *principal* untuk memilih agen yang paling mungkin dapat memenuhi kepentingan mereka.

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori Sinyal (*Signaling Theory*) dapat membantu perusahaan (agen), pemilik (prinsipal), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat. Agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat percaya pada keandalan informasi keuangan yang disampaikan oleh agen, diperlukan pendapat dari pihak independen mengenai laporan keuangan tersebut.

Menurut teori sinyal, pemerintah yang dipercaya oleh rakyat menunjukkan sinyal positif kepada masyarakat melalui laporan keuangan yang baik, sistem pengendalian internal yang kuat, dan pengungkapan informasi yang lengkap. Selain itu, pemerintah daerah dapat menyampaikan informasi yang lebih mendetail tentang prestasi dan kinerja keuangan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi amanah rakyat (Puspita & Martani, 2013).

Efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan sangat memengaruhi pandangan auditor. Pemerintah daerah berusaha mendapatkan penilaian positif dengan mengurangi kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Ini merupakan contoh dari biaya agensi antara pemerintah dan pihak berwenang (Abdullah, 2012).

Pemerintah daerah menunjukkan kepada pihak berwenang bahwa mereka telah menjalankan tanggung jawab mereka dengan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Selain itu, penerapan sistem pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan keuangan dapat menghasilkan opini yang lebih positif (Puspita & Martani, 2013).

Pengembangan Hipotesis Penelitian

Menurut Peraturan BPK-RI Nomor 1 tahun 2007, terdapat empat kriteria opini dalam audit LKPD: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Keandalan laporan keuangan pemerintah daerah tercermin dari opini yang diberikan oleh auditor BPK-R.

Pemerintah daerah harus mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik. Kesuksesan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan daerah. Tujuan pembangunan akan tercapai jika keuangan pemerintah daerah dikelola dengan efektif. Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik harus diterima, diintegrasikan, dan diutamakan. Nilai-nilai penting yang harus diperjuangkan termasuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, serta transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat.

Jika pemerintah daerah berhasil mencapai tujuannya dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana hasil program sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu dengan membandingkan keluaran dengan hasil. Laporan keuangan akan lebih akurat jika manajemen keuangan daerah berjalan dengan baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Efektivitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan dianggap efisien jika memenuhi standar efisiensi berdasarkan konsep input-output. Dalam bidang pelayanan masyarakat, efisiensi berarti mencapai hasil dengan pengorbanan yang minimal. Dengan kata lain, suatu kegiatan dikatakan efisien jika dapat mencapai sasaran dengan biaya terendah atau seminimal mungkin, sambil menghasilkan hasil yang diinginkan. Dengan memanfaatkan potensi dan keragaman masing-masing daerah, pemerintahan daerah dapat dijalankan dengan lebih efisien.

Hubungan antara masukan dan keluaran disebut efisiensi. Ini mengukur apakah barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi pemerintahan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020). Laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih baik jika dikelola dengan baik. Dengan demikian, laporan keuangan dianggap andal jika menyajikan informasi secara akurat. Sebaliknya, keandalan laporan keuangan akan menurun jika pengelolaan keuangan daerah tidak efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis kedua dari studi ini adalah:

H₂: Efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu tanggung jawab pemerintah daerah adalah melaporkan pertanggungjawaban untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, yang ditunjukkan dalam laporan keuangan. Menurut

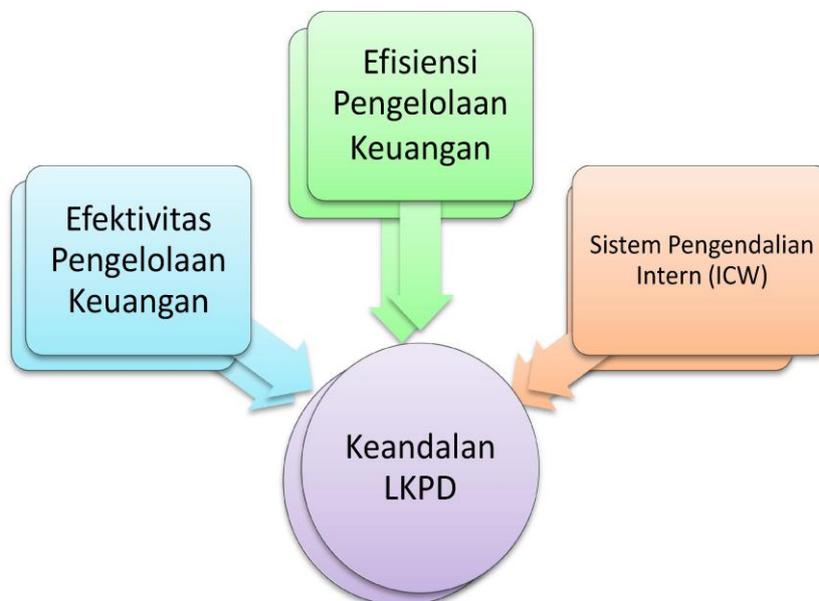
Permendagri No. 77 Tahun 2020, laporan keuangan daerah dibuat untuk mencerminkan posisi keuangan pemerintah daerah dan semua transaksi yang terjadi selama periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut mencakup Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan keuangan daerah harus mematuhi peraturan akuntansi pemerintah yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Tujuannya adalah agar laporan keuangan lebih akuntabel, mengingat pentingnya kualitas laporan tersebut. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan informasi akuntansi yang jelas dan mudah dipahami, serta mendukung pengambilan keputusan (Xu et al., 2003). Menurut standar akuntansi pemerintahan, informasi dalam laporan keuangan harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami untuk menjadi bermanfaat. Pemerintah daerah dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mereka jika informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi standar akuntansi pemerintah dan kriteria kualitas laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah (Baining et al., 2021; Handayani et al., 2022; Indriyani & Ahmad, 2023; Kuntadi et al., 2022; Kusnadi et al., 2022; Latjandu et al., 2016; Maydiyanti et al., 2020; Pura, 2021; Raudhatul & Ishak, 2023; Shofiyah et al., 2023).

Opini auditor BPK-RI mencerminkan keandalan laporan keuangan. Semakin baik keandalan laporan keuangan, semakin positif opini yang diberikan, dan sebaliknya. Evaluasi oleh BPK-RI menunjukkan bahwa LKPD yang mendapatkan opini WTP dan WDP umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, namun masih memerlukan perbaikan. Untuk LKPD yang mendapatkan opini TW dan TMP, sistem pengendalian internal perlu diperbaiki agar informasi dalam laporan keuangan lebih dapat diandalkan. Banyaknya opini TW dan TMP dari BPK menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah masih belum optimal. Oleh karena itu, keandalan data dalam laporan keuangan sangat penting untuk mengatasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Semakin baik sistem pengendalian internal, semakin akurat laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini adalah:

H₃: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

C. METODE PENELITIAN

Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang dipublikasikan. Sumber data ini termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penelitian ini juga menggunakan data dari Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester I Tahun 2023, yang mencakup temuan-temuan tentang sistem pengendalian internal (SPI) dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Data yang digunakan adalah data *cross-section*.

Operasionalisasi Variabel

Keandalan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Hasil audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2022 memberikan penilaian mengenai keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin andal laporan keuangan, semakin positif opini yang diberikan. Sebaliknya, jika laporan keuangan tidak andal, opininya akan semakin buruk. Penelitian ini menggunakan variabel dummy, di mana nilai 1 diberikan untuk opini LKPD WTP dan nilai 0 untuk opini lainnya.

Faktor independen lainnya dalam penelitian ini mencakup sistem pengendalian internal, efisiensi keuangan daerah, dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisis dengan menghitung rasio antara realisasi pendapatan daerah dan target pendapatan daerah. Ini mengukur pencapaian hasil program atau kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan membandingkan keluaran dengan hasil (PP 12 Tahun 2019). Laporan realisasi anggaran kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2022 yang diaudit oleh BPK-RI menunjukkan pendapatan daerah, yang merupakan gabungan dari realisasi anggaran dan pendapatan daerah. Formulasi laporan sebagai berikut: (Darsil, 2004):

$$Efektivitas\ Pendapatan = \frac{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah}{Target\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Realisasi belanja dan pendapatan daerah merupakan indikator efisiensi keuangan daerah. Laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2022, yang telah diaudit oleh BPK-RI, mencakup total belanja dan pendapatan daerah. Formulasi laporan sebagai berikut (Darsil, 2004):

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah}{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Hasil audit BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2022 menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal diukur berdasarkan kelemahan dalam sistem tersebut. Semakin tinggi nilai kelemahan sistem pengendalian internal, semakin buruk kualitas sistem tersebut, sedangkan nilai kelemahan yang lebih rendah menunjukkan kualitas sistem pengendalian internal yang lebih baik.

Model Penelitian

$$KEANDALAN = \beta_0 + \beta_1 EFektivitas_i + \beta_2 Efisiensi_i + \beta_3 ICW_i + U_i$$

Keterangan:

- KEANDALAN: Keandalan Laporan Keuangan Daerah
- EFEKTIVITAS: Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- EFISIENSI: Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah
- ICW: *Internal Control Weakness*
- β_0 : Constanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi
- U_i : Kabupaten/Kota

Model regresi berganda dengan data cross section menggunakan metode Fixed Effect (FE) karena data yang dianalisis mencakup seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, yang berfungsi sebagai populasi dan sampel, dengan analisis dilakukan melalui pengujian logit.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji statistik deskriptif memberikan informasi tentang nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi

standar dari data. Berikut adalah hasil statistik deskriptif dari penelitian ini:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

| Des Stat | Efektivitas | Efisiensi | SPI |
|----------|-------------|-----------|---------|
| Mean | 100,245 | 96,896 | 28,519 |
| Median | 100,000 | 97,250 | 25,000 |
| Maximum | 157,950 | 127,250 | 100,000 |
| Minimum | 73,000 | 57,900 | 2,780 |
| Std.Dev. | 6,889 | 7,142 | 13,814 |

Tabel 1. Menunjukkan bahwa nilai rata-rata efektivitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2011 adalah 100,245%, sedangkan nilai rata-rata efisiensi adalah 96,89%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah kurang efisien. Selain itu, nilai rata-rata SPI sebesar 28,52 menunjukkan bahwa hasil audit BPK RI menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemerintah.

Pengujian hipotesis menggunakan metode *fixed effect* menunjukkan hasil sebagai berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji *Fixed Effect*

| Variabel | Koefisien | Odd Ratio | Standar Error |
|--------------------|--------------|-----------|---------------|
| C | - 8,1458 * | 0,0003 | 4,6019 |
| Efektifitas | 0,04312 * | 1,0441 | 0,02484 |
| Efisiensi | 0,0328 | 1,0333 | 0,02854 |
| SPI | - 0,1509 *** | 0,8599 | 0,04029 |
| McFadden R-squared | 0,0649 | | |
| LR statistic | 21,8103 | | |
| Prob(LR statistic) | 0,0001 | | |
| % Correct | 88,56 | | |

Ket: Efek adalah efektifitas diukur dengan realisasi pendapatan daerah/target pendapatan daerah dikali 100%; Efisiensi diukur dengan realisasi pendapatan daerah/realisasi belanja daerah dikali 100%; SPI diukur dengan jumlah kelemahan SPI berdasarkan temuan BPKRI.

*** signifikan pada level 1%, ** signifikan pada level 5%, *signifikan pada level 10%

Variabel efektivitas, efisiensi, dan sistem pengendalian internal dapat menjelaskan 6,48% dari keandalan laporan keuangan dalam model efek tetap, dengan nilai McFadden R-Squared sebesar 0,067. Sementara itu, variabel lain menjelaskan 93,52% dari total keandalan laporan keuangan.

Sebanyak 21,81% dari keandalan laporan keuangan dipengaruhi oleh kombinasi variabel efektivitas pendapatan, efisiensi, dan sistem pengendalian internal, berdasarkan nilai LR-statistik sebesar 21,81.

Dengan nilai probabilitas sebesar 88,56%, variabel efektivitas pendapatan, efisiensi, dan sistem pengendalian internal dapat menjelaskan 88,56% dari keandalan laporan keuangan, sementara variabel lainnya menyumbang sisa 11,44%.

Tabel 2 menunjukkan bahwa berdasarkan uji parsial (uji t), nilai odd ratio untuk efektivitas pendapatan adalah 1,04. Ini berarti bahwa peluang pemerintah daerah untuk mendapatkan opini WTP akan meningkat sebesar 1,04 kali jika efektivitas pendapatan meningkat sebesar 1%. Hal ini berbeda dengan pemerintah daerah yang efektivitas pendapatannya tidak meningkat. Menurut teori keagenan, pemerintah daerah dapat menunjukkan seberapa efektif mereka dalam mengatasi kemungkinan asimetri informasi. Teori ini menyatakan bahwa efektivitas pendapatan berhubungan dengan prediksi masa depan, yang berarti asimetri informasi akan menurun dan biaya agensi akan lebih efektif. Ini menggambarkan bagaimana informasi pengelolaan keuangan daerah dikelola oleh agen dari perspektif hubungan principal-agen, Sementara itu, agen cenderung memaksimalkan keuntungan atau kepentingan pribadi mereka sendiri. Karena kepentingan antara pihak-pihak tersebut seringkali bertentangan, informasi mengenai pengelolaan dana publik menjadi sangat penting. Pemerintah daerah menunjukkan kepada pihak berwenang bahwa mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka sebagai pengemban amanat rakyat dengan memberikan sinyal, menurut teori sinyal. Ini berarti bahwa laporan keuangan yang lebih andal akan mencerminkan opini yang diperoleh dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Selain itu, Tabel 2 menunjukkan nilai odd ratio untuk SPI sebesar 0,86. Ini berarti bahwa jika temuan SPI meningkat satu kali, kemungkinan opini akan turun dari WTP ke opini lainnya sebesar 0,86 kali. Ini berbeda dengan pemerintah daerah yang tidak memiliki temuan SPI. Menurut teori keagenan, audit BPK atas laporan keuangan mengurangi asimetri informasi karena informasi yang dimiliki oleh agen dapat diakses dan diketahui oleh kedua belah pihak (eksekutif dan masyarakat). Akibatnya, terjadi keseimbangan informasi, dan informasi tersebut

didistribusikan ke kedua belah pihak, yang dapat mengakibatkan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Menurut teori sinyal, pemerintah daerah berusaha menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka telah memenuhi tanggung jawab mereka dengan menyediakan laporan keuangan yang baik dan memperbaiki sistem pengendalian internal. Laporan keuangan yang lebih andal akan menghasilkan opini yang lebih baik, dan penerapan sistem pengendalian internal yang baik juga akan meningkatkan opini tersebut. Pemerintah daerah ingin menunjukkan kepada pihak berwenang bahwa mereka telah memenuhi kewajibannya. Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Agindawati (2012); Akbar (2013); Ekasari (2012); Setyowati et al. (2016).

E. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hanya dua dari tiga hipotesis yang diajukan—yaitu hipotesis pertama dan ketiga—yang mendapat dukungan. Sementara itu, SPI berdampak negatif terhadap keandalan laporan keuangan, efektivitas pendapatan menunjukkan bahwa semakin baik pengelolaan keuangan daerah, semakin besar kemungkinan mendapatkan opini WTP dalam audit laporan keuangan.

Agar keandalan laporan keuangan daerah meningkat, pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan serta memperbaiki manajemen SPI.

REFERENSI

- Abdullah, S. (2012). *Perilaku Oportunistik Legislatif dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya: Bukti Empiris dari Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Agindawati, I. N. (2012). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Pernyataan Opini. *Jurnal Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Jawa Barat*, 1–8.
- Akbar, H. I. (2013). *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta)*. Universitas Gadjah Mada.
- Baining, M. E., Nengsih, T. A., & Ramadhan, S. (2021). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kota Jambi Tahun 2021. *Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 163–179.
- Bergman, M., & Lane, J.-E. (1990). Public Policy in a Principal-Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics*, 2(3), 339–352. <https://doi.org/10.1177/0951692890002003005>
- Ekasari, W. (2012). *aktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar: Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Kampar*. Universitas Riau.
- Gilardi, F. (2001). Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation. *ECPR General Conference 6-8 September 2001*.
- Handayani, F., Sari, D. M., & Yuniarti, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 505–520.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,*
- Indriyani, A. T., & Ahmad, A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 505–520. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam/article/view/8245/3675>
- Kuntadi, C., Magdalena, J. E. S., & Syafira, S. I. (2022). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(5), 458–468.
- Kusnadi, A., Oemar, F., & Supeno, B. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Sains Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 51–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.55356/sak.v1i1.10>
- Lane, J.-E. (2000). *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. SAGE Publications.
- Latjandu, I., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Accounting, Finance, Auditing, Taxation*, 5(2), 98–109.
- Martani, D., & Zaelani, F. (2011). *Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Maydiyanti, S., Putri, A. M., & Anriva, D. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 69–78.
- Moe, T. M. (1984). The New Economics of Organization. *American Journal of Political Science*, 28(4), 739–777. <https://doi.org/10.2307/2110997>
- Petrie, M. (2002). A Framework for Public Sector Performance Contracting. *OECD Journal on Budgeting*, 1(3), 117–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/budget-v1-art18-en>

- Pura, R. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 18(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.37476/akmen.v18i1.1316>
- Puspita, R., & Martani, D. (2013). Analisis Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV*, 0–25.
- Raudhatul, A., & Ishak, J. F. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(3), 202–211.
- Setyowati, L., Istikha, W., & Dian, R. P. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Jurnal Kinerja*, 20(2), 179–191.
- Shofiyah, I., Rizalullah, A., & Amalia, D. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *InFestasi*, 19(1), 51–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.20004>
- STRØM, K. (2000). Delegation and accountability in parliamentary democracies. *European Journal of Political Research*, 37(3), 261–289. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1475-6765.00513>
- Wahyuni, S. (2008). *Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Suatu Telaah Empirik Di Kabupaten Karanganyar Tahun 1990 – 2005)*. Universitas Sebelas Maret.
- Xu, H., Horn Nord, J., Daryl Nord, G., & Lin, B. (2003). Key issues of accounting information quality management: Australian case studies. *Industrial Management & Data Systems*, 103(7), 461–470. <https://doi.org/10.1108/02635570310489160>